

CAP Meningkatkan Partisipasi Komunitas Dalam Pendidikan Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur



Siswa senang melihat luar (kelas)

Foto: Budi Satriawan

PENDAHULUAN

Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat pendidikan terendah di Indonesia (Kemendikbud, 2012). Angka partisipasi Sekolah Dasar (95,96%) pun lebih rendah dari nilai rata-rata nasional yaitu 97,58% (BPS, 2011). Bahkan, 17% dari 209,300 anak NTT berada di luar sekolah (Sensus 2010). Dari 21 kabupaten di NTT, Alor merupakan salah satu dari delapan kabupaten dengan jumlah anak di luar sekolah terbanyak. Hal ini sangat memprihatinkan.

Menindaklanjuti program pembuatan SIPBM (Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat), kajian etnografi LAURA-UGM bersama masyarakat menemukan kondisi paradoks partisipasi anak bersekolah. Orang Alor memandang bersekolah itu membanggakan, namun mereka juga tidak mempersoalkan bila ada anak tidak sekolah. Ada fakta bahwa secara kelembagaan hubungan antara sekolah dengan komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup sehari-hari belum harmonis. Komunitas adat lebih memperhatikan urusan pesta-pesta adat, kelahiran, pernikahan, dan kematian daripada berpartisipasi dalam urusan pendidikan “anak-anak adat.”

Guna memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah Kabupaten Alor telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur hak masyarakat merencanakan, melaksanakan, mengawasi

Policy Brief ini dipersembahkan untuk:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Desa, KPDT dan Transmigrasi
Kementerian Sosial
Pemerintah Daerah Provinsi NTT
Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

dan mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (pasal 5, huruf g). Dengan demikian, telah dilakukan penyusunan CAP (*Community Action Plan/Rencana Aksi Komunitas*) di Desa Alaang dan Alila Selatan, Kecamatan Alor Barat Laut. Intinya adalah untuk menguatkan partisipasi komunitas menuju pendidikan berkualitas. Di dua desa tersebut sudah terbentuk Komite Pendidikan desa yang siap menjalankan keseluruhan proses CAP. **Apa yang telah dicapai oleh Desa Alaang dan Alila Selatan seyogyanya dapat dikembangkan di desa-desa lain di seluruh Kabupaten Alor.**

KONTEKS DAN MASALAH

Hasil studi etnografi LAURA pada lima desa di Alor Barat Laut, menemukan sejumlah permasalahan pendidikan, baik di tingkat komunitas, desa, kecamatan, maupun kabupaten, yang perlu segera diatasi. Masalah itu antara lain gejala anak meninggalkan kegiatan sekolah terkait dengan urusan adat dan komunitas. Anak-anak sering tidak masuk sekolah ketika ada pesta-pesta adat dan ketika musim tanam atau panen. Anak ikut meramaikan pesta dan ikut membantu kegiatan. Bahkan para guru pun larut dalam pesta-pesta hingga tidak jarang sekolah sengaja diliburkan. Kegiatan sehari-hari dan adat istiadat di desa kurang cocok dengan kegiatan persekolahan.

Harus diakui bahwa bagaimana pun adat adalah media reproduksi sosial, artinya proses kelangsungan hidup berkomunitas tergantung pada kemampuan adat menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak adatnya sampai mereka “tahu adat”. Pendidikan dilakukan warga masyarakat adat secara kekeluargaan sambil memecahkan persoalan hidup sehari-hari. Hasilnya adalah anak-anak adat yang mampu/terampil memecahkan soal hidup sehari-hari. Dalam pola ini, pendidikan tidak terlembagakan secara khusus seperti



Bikin adat: pesta...pesta...pesta

Foto: Budi Satriawan

dalam sekolah. Pikiran bahwa sekolah dapat menggantikan fungsi pendidikan membuat adat seolah terbebas dari tanggungjawab dalam menyelenggarakan keterampilan hidup. Hal ini terjadi karena adat sering kali dimaknai hanya sebagai lembaga yang meneruskan atau melestarikan nilai-nilai lama. Pada akhirnya, kreativitas dari komunitas adat menjadi lemah, bahkan mati.

Sementara itu, masalah pendidikan formal masih diwarnai kurang maksimalnya kinerja sekolah seperti kelas lebih sering kosong, guru sering berganti-ganti dan kegiatan guru yang justru terkonsentrasi pada urusan administrasi pendidikan daripada fokus pada pelayanan dan perhatian untuk anak didik. Metode pendidikan yang digunakan di sekolah pun sering tidak kreatif sehingga tidak mampu mendorong siswa aktif belajar dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu komunikasi antara lembaga sekolah dengan orang tua murid pun sering tidak berjalan, sehingga partisipasi orang tua dalam pengembangan pendidikan di sekolah relatif rendah. Dapat disimpulkan, justru ketika sekolah sebagai ujung tombak pendidikan nasional belum dapat menjamin kelangsungan hidup di desa, komunitas adat yang seharusnya mampu pendidikan keterampilan hidup malah mangkir. Pengetahuan dan keterampilan hidup sehari-hari terabaikan. Akibatnya ketahanan dan

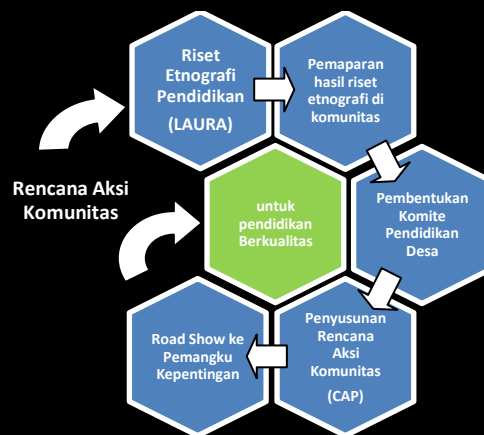


kemandirian hidup di desa pun melemah.

CAP SEBAGAI METODE MENINGKATKAN PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PENDIDIKAN

Community Action Plan (Rencana Aksi Komunitas) adalah sebuah konsep perencanaan pembangunan berbasis komunitas. Munculnya konsep CAP merupakan respon terhadap berbagai kejanggalan dan kegagalan pendekatan pembangunan yang terpusat dan pragmatis. Melalui metode CAP, komunitas memiliki peran yang nyata dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. Rencana yang dihasilkan pun menjadi lebih aktual dan kontekstual daripada perencanaan dari atas yang tersentralisir. Pemerintah daerah pun niscaya terbantu oleh CAP, karena akan mendapatkan sebuah

perencanaan yang bukan saja tepat sasaran tetapi juga didukung penuh masyarakat.



Pada bulan Oktober 2015, Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (Laura) UGM didukung UNICEF dan Bappeda kabupaten Alor telah melaksanakan fasilitasi Penyusunan CAP di Desa Alila Selatan dan Alaang, kecamatan Alor Barat Laut. Pelaksanaan CAP ini telah didahului dengan riset etnografi pendidikan yang dilakukan LAURA pada tahun sebelumnya. Dalam hal ini, riset etnografi dimengerti sebagai penelitian holistik (menyeluruh), inklusif dan apresiatif tentang bagaimana orang yang berbeda-beda telah melangsungkan hidupnya secara berkomunitas.

Penelitian berusaha menemukan konteks sosial-budaya, apa yang saling dipahami orang, ketika hidup sehari-hari di tempat tertentu. Hasil riset etnografi dapat membantu warga komunitas setempat secara terorganisir untuk menata ulang pengetahuannya, sehingga lebih mudah mencari solusi atas berbagai masalah, termasuk masalah pendidikan. Setelah tim LAURA mempresentasikan kembali hasil risetnya, warga komunitas di kedua desa mendiskusikannya. Terantik dan terinspirasi dari diskusi itu, mereka kemudian sepakat membuat perubahan dengan menyusun CAP.

Selama proses memfasilitasi penyusunan CAP, tim LAURA mendapatkan banyak masukan berharga terkait dengan potensi dan kapasitas komunitas dalam melakukan perubahan. Komunitas pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan tentang persoalan pendidikan di desa mereka, akan tetapi pengetahuan tersebut umumnya berupa informasi yang parsial/ terpecah-pecah/tidak utuh, sehingga belum mempengaruhi sikap untuk membuat perubahan. Tugas Tim LAURA sebagai fasilitator adalah mengajak warga untuk menata ulang



Foto: Budi Satriawan



Saat beraksi...

Foto: Budi Satriawan

atau memetakan pengetahuan mereka sehingga tersusun menjadi suatu sistem pengetahuan bersama. Sistem pengetahuan bersama ini bukan sekedar dokumentasi informasi dari luar, tetapi berupa metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun tampilannya sederhana, tetapi rencana yang dihasilkan bersifat tepat guna bagi kebutuhan setempat. Dengan pengetahuan bersama itu, ternyata berbagai persoalan pendidikan yang selama ini hanya diperlakukan sebagai masalah individu atau keluarga, dapat diubah bahkan diterima sebagai masalah bersama dalam komunitas adat.

Tim LAURA juga melihat bukti bahwa adat selama ini telah berperan besar dalam mengurus berbagai permasalahan komunitas, mulai dari kelahiran, pernikahan, kematian, hingga konflik sosial. Akan tetapi lembaga adat tidak begitu terlihat perannya dalam memajukan pendidikan. Hal ini bukanlah tanpa alasan. Lembaga adat telah dimarginalisasi sehingga diposisikan sekedar pelestari budaya masa lalu, sedangkan pendidikan sebagai bagian dari modernisasi digarap oleh lembaga formal terutama sekolah. Akibatnya dunia pendidikan lepas dari urusan adat, dan semakin tinggi pendidikan semakin besar kecenderungan orang meninggalkan komunitasnya.

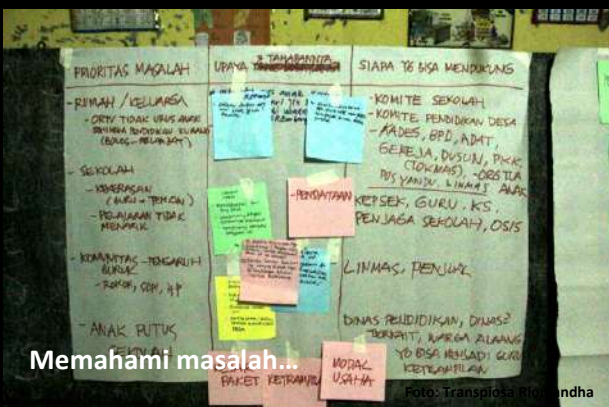
Melalui proses perumusan CAP, komunitas diajak untuk mengingat kembali prinsip-prinsip adat yang selama ini agak terkaburkan dengan urusan yang sifatnya teknis. Sebagai contoh, salah satu prinsip adat adalah memastikan setiap orang dalam komunitas untuk dapat saling bertemu dan berbagi. Pada masa lalu, sebelum dikumpulkan dalam sebuah kampung seperti saat ini, umumnya orang-orang tinggal di kebun di atas bukit, jarak dari satu rumah ke rumah yang lain bisa sangat

jauh. Dalam keadaan seperti itu, pesta-pesta menjadi relevan untuk diadakan sebagai sarana bertemu, bertukar pikiran hingga mencari jodoh. Saat ini mereka sudah tinggal di sebuah kampung yang tergolong cukup padat, apakah masih perlu melakukan pesta yang terlalu sering itu? Bisakah biaya, tenaga dan waktu yang banyak tercurah untuk pesta-pesta itu dialihkan sebagian untuk memajukan pendidikan, misalnya? Artinya, pesta itu hanyalah soal teknis, yang bisa diubah dan disesuaikan dengan perkembangan jaman dan lingkungan.

Revitalisasi lembaga adat untuk memajukan pendidikan sangat beralasan karena lembaga ini terpercaya sehingga bisa menjadi penggerak pembangunan di desa. Lembaga adat bisa menjadi mitra sekolah dan keluarga untuk mendorong anak sekolah. Peran itu bisa dimulai dengan keterlibatan tokoh-tokoh adat dalam pelaksanaan dan perumusan program CAP. Dari sana mereka mulai memikirkan dan menentukan pendidikan seperti apa yang perlu dan tepat dikembangkan oleh dan untuk komunitas, bukan pendidikan yang sekedar untuk kepentingan individu-individu semata, dan bukan pula hanya membatasi diri pada bentuk pendidikan yang formal saja.

Hasil yang telah dicapai oleh pelaksanaan CAP di dua desa adalah terjadinya tiga transformasi penting, yaitu:

- Warga desa yang semula hanya diposisikan sebagai *penerima* informasi, kini mampu mencari, mengumpulkan dan mengolah data secara mandiri. Mereka telah merintis sebuah sistem pendataan sederhana yang memuat informasi tentang seluruh anak usia sekolah yang ada di desa. Dari data itu akan diketahui siapa saja yang mengalami masalah terkait pendidikan, dan apa persisnya masalah yang dialami si anak tersebut.
- Warga desa yang semula tahu atau mengetahui sesuatu ala kadarnya kemudian berubah mampu **bersikap** untuk melakukan **aksi**. Dengan berbasis data, komunitas mampu melakukan komunikasi dan mediasi dengan berbagai pihak yang terkait persoalan pendidikan.
- Warga desa yang semula bertindak sendiri-sendiri (individual), sekarang mulai kerja terorganisir dan sistemik melalui Komite Pendidikan Desa. *CAP yang dilakukan di dua desa di Alor Barat Laut telah melahirkan Komite Pendidikan Desa sebagai motor penggerak rencana aksi masyarakat. Hadirnya komite pendidikan di tingkat desa dan rencana aksi yang mereka susun menjadi langkah penting bagi terjadinya transformasi bagaimana pendidikan, khususnya sekolah, sebetulnya bisa menjadi urusan komunitas.*



Memahami masalah...

Foto: Transpiloti Rindha

KESIMPULAN

- Bahwa adat bukanlah sesuatu yang baku, tetapi terkait dengan lokasi geografis dan

waktu/kesejarahan. Inti adat adalah untuk mencapai perdamaian, caranya dengan bermusyawarah, dan pelaksanaannya dengan bergotong-royong. Adat selama ini mengurus kelangsungan hidup berkomunitas, terutama dalam urusan perkawinan, kelahiran, kematian dan konflik sosial. Demi keberlangsungan hidup berkomunitas, maka berapapun biaya diperlukan akan selalu diusahakan untuk dipenuhi.

- Benturan dengan prakarsa sektor-sektor pembangunan dari pemerintah seringkali membuat adat bertahan dan kehilangan kelenturannya. Prakarsa-prakarsa itu justru cenderung memposisikan adat sebagai lembaga “baku,” pelestari nilai serta tanda-tanda yang sudah ada dan bukan sebagai lembaga pembaharu masyarakat.
- Sekolah selama ini masih belum menjadi urusan komunitas adat. Meski demikian, adat sesungguhnya adalah media reproduksi sosial. Artinya, dalam rangka proses melanjutkan hidup berkomunitas, adat niscaya juga menyelenggarakan pendidikan yang berlangsung sejalan dengan hidup sehari-hari. Meski belum terlembagakan secara khusus, partisipasi adat dalam pendidikan adalah nyata dan menjawab persoalan hidup sehari-hari.
- Dari studi dan fasilitasi yang dilakukan LAURA, terbukti bahwa komunitas adat sesungguhnya mampu ikut terlibat dalam urusan sekolah. Adat sudah memiliki modal budaya dan sejarah untuk menyelenggarakan pendidikan.

OPSI KEBIJAKAN

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu merespon inisiatif penguatan pendidikan di desa berbasis partisipasi warga dengan menggunakan CAP
- Kementerian Desa, KPDT dan Transmigrasi perlu mendukung inisiatif daerah pulau terluar terpencil, rawan pangan dan rawan konflik dalam melakukan penguatan pendidikan di desa berbasis partisipasi warga dengan menggunakan CAP
- Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mendukung upaya daerah dalam mendukung penguatan pendidikan di desa melalui CAP.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Alor perlu mengeluarkan peraturan daerah sebagai payung hukum yang memberikan pengakuan, dukungan kelembagaan, fasilitasi dan penganggaran bagi penyelenggaraan CAP di setiap desa.
- Pemerintah Daerah perlu mendorong Pemerintah Desa untuk menindak-lanjuti hasil CAP di desanya melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan CAP dengan mendukung upaya

masyarakat memiliki fasilitator pendamping dan melakukan pembinaan dan pengawasan CAP di setiap desa agar terselenggara CAP yang melibatkan partisipasi masyarakat yang tinggi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan CAP.

- Pemerintah Daerah perlu mengakomodasi hasil CAP di setiap desa sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program di bidang pendidikan.
- Pemerintah Desa perlu mengeluarkan peraturan desa sebagai payung hukum yang memberikan pengakuan, dukungan kelembagaan, fasilitasi dan penganggaran atas penyelenggaraan CAP
- Pemerintah Desa perlu mengakomodasi rekomendasi CAP ke dalam musrenbang desa sebagai bahan kebijakan dan program desa.
- Pemerintah Desa perlu menyalurkan rekomendasi CAP tentang pengembangan pendidikan di desa guna mendapatkan respon kebijakan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat luas.
- Organisasi masyarakat sipil dan organisasi berbasis komunitas (*Community based organization*) perlu memposisikan diri sebagai bagian dari komunitas yang aktif melaksanakan CAP secara partisipatif.



- Semua pihak perlu mengapresiasi orang-orang yang telah menjalankan pendidikan “keterampilan hidup” di desa. Pengalaman perorangan dapat ditransformasikan menjadi pengalaman komunitas, misalnya dengan cara menyelenggarakan pendidikan non-formal yang didasarkan pada potensi dan prospeknya bagi desa. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan bukan terbatas pada sekolah saja, dan penyelenggaranya pun bisa oleh komunitas atau adat, tidak harus pemerintah atau lembaga resmi.

Disusun oleh:

Tim LAURA UGM

Gd. Margono Lt. 3 Jl. Sosiohumaniora Bulaksumur

Yogyakarta 55281 Phone: (0274) 513096